

## TANTANGAN DAN PELUANG DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI PEMERINTAHAN DAERAH

Faizah Julina<sup>1</sup>; Suprati Widiasih<sup>2</sup>; Dini Sekarsari<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI  
**\*Correspondence Author:** suprati@stiami.ac.id

### ABSTRAK

#### Histori Artikel

##### Submitted

1 November 2024

##### Reviewed

30 November 2024

##### Accepted

10 Desember 2024

##### Published

31 Desember 2024

Implementasi kebijakan lingkungan hidup di pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya sumber daya, baik di dalam maupun di luar negeri dari segi keuangan dan sumber daya manusia yang kompeten. Banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan menyediakan anggaran yang memadai untuk program lingkungan hidup karena bersaing dengan sektor lain seperti infrastruktur dan kesehatan. Selain itu, kurangnya tenaga ahli di bidang lingkungan hidup juga semakin parah situasi ini, menghambat efektivitas penerapan kebijakan tersebut telah dirumuskan. Di sisi lain, tantangan regulasi dan koordinasi antar lembaga juga menimbulkan kendala yang signifikan. Ketidaksinkronan peraturan antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menjadi penyebabnya kebingungan dalam melaksanakan kebijakan di lapangan. Koordinasi

yang buruk antar institusi pemerintah, baik secara horisontal maupun vertikal, juga menjadi penyebabnya program yang tumpang tindih dan kebijakan yang tidak efektif. Kondisi ini semakin parah oleh rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang menyebabkan kurangnya dukungan dari masyarakat. Namun terdapat peluang besar dalam upaya penerapan lingkungan hidup kebijakan yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Penggunaan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti informasi geospasial sistem dan pemantauan kualitas udara secara real-time, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program lingkungan. Selain itu, kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah juga dapat menjadi katalisator memperkuat kapasitas dan pembiayaan. Adanya kesadaran global tentang pentingnya kelestarian lingkungan juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh dukungan internasional dalam bentuk dana dan teknis untuk proyek lingkungan.

**Kata Kunci:** Kebijakan Lingkungan, Pemerintah Daerah, Regulasi

### ABSTRACT

The implementation of environmental policies in local governments faces various complex challenges. One of the main challenges is the limited resources, both at home and abroad in terms of financial and competent human resources. Many local governments have difficulty providing adequate budgets for environmental programs because they compete with other sectors such as infrastructure and health. In addition, the lack of experts in the field of environment is also worsening this situation, hindering the effectiveness of the implementation of the policy that has been formulated. On the other hand, regulatory challenges and coordination between institutions also pose significant obstacles. The inconsistency of regulations between the central and regional governments is often the cause of confusion in implementing policies in the field. Poor coordination between government institutions, both horizontally and vertically, is also the cause of overlapping programs and ineffective policies. This condition is exacerbated by the low level of community participation in the policy-making and implementation process which leads to a lack of support from the community. However, there is a great opportunity in efforts to implement environmental policies that can be optimized by local governments. The use of technology and innovations in environmental management, such as system geospatial information and real-time air quality monitoring, can improve the efficiency and effectiveness of environmental programs. In addition,

*partnerships with the private sector and non-governmental organizations can also be a catalyst for capacity building and financing. The existence of global awareness of the importance of environmental sustainability also opens up opportunities for local governments to obtain international support in the form of funds and technical for environmental projects.*

**Keywords:** *Environmental Policy, Local Government, Regulation*

## PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan lingkungan hidup pada pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam upaya menjaga kelestarian ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan tersebut mencakup berbagai program dan peraturan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan, seperti pengelolaan limbah, perlindungan keanekaragaman hayati, dan mitigasi perubahan iklim. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan lingkungan hidup di tingkat daerah menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius. Keterbatasan sumber daya keuangan dan manusia, kurangnya sinkronisasi peraturan antara pemerintah pusat dan daerah, serta tidak efektifnya koordinasi antar lembaga merupakan beberapa permasalahan utama yang kerap menghambat implementasi kebijakan ini secara *perfect*.

Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Anggaran yang terbatas sering kali membuat pemerintah daerah kesulitan untuk membiayai program-program lingkungan yang membutuhkan investasi besar. Selain itu, kekurangan tenaga ahli di bidang lingkungan juga memperparah situasi ini, mengakibatkan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan sesuai rencana. Regulasi yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah juga menambah kompleksitas, karena sering kali menimbulkan kebingungan dan inkonsistensi dalam implementasi di lapangan. Selain itu, koordinasi yang buruk antara berbagai lembaga pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional, mengakibatkan tumpang tindih program dan kebijakan yang tidak efektif. Keterbatasan sumber daya *cash related* dan manusia, kurangnya sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah serta koordinasi yang tidak efektif antar lembaga adalah isu utama yang sering menghambat pelaksanaan kebijakan ini secara *perfect* (Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik and Rahmadi, 2022).

Di sisi lain, terdapat berbagai peluang yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat implementasi kebijakan lingkungan di pemerintahan daerah. Penggunaan teknologi inovatif seperti sistem informasi geospasial dan alat pemantauan kualitas udara *real-time* dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan lingkungan. Kemitraan strategis dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah juga menawarkan peluang untuk memperluas kapasitas dan sumber daya melalui kolaborasi dan sinergi. Selain itu, meningkatnya kesadaran *around the world* tentang pentingnya kelestarian lingkungan membuka akses pada dukungan internasional dalam bentuk pendanaan dan bantuan teknis. Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, pemerintah daerah dapat mengatasi berbagai tantangan dan lebih efektif dalam melaksanakan kebijakan lingkungan, demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggali tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan lingkungan di pemerintahan daerah. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai dinamika yang terjadi dalam konteks implementasi kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur, wawancara mendalam, dan analisis dokumen.

### 1. Studi Literatur:

Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan. Tahap ini bertujuan untuk memahami kerangka teoritis dan konteks kebijakan lingkungan, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang telah diungkapkan dalam penelitian sebelumnya

### 2. Wawancara Mendalam:

Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat

pemerintah daerah, ahli lingkungan, perwakilan organisasi nonpemerintah, dan anggota masyarakat yang terlibat dalam isu-isu lingkungan. Pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling untuk memastikan variasi perspektif yang memadai. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan langsung mengenai pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan lingkungan, serta untuk mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan. Pertanyaan wawancara difokuskan pada isu-isu spesifik seperti alokasi anggaran, koordinasi antar lembaga, partisipasi masyarakat, dan penggunaan teknologi dalam pengelolaan lingkungan.

Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah daerah, ahli lingkungan, perwakilan organisasi nonpemerintah, dan anggota masyarakat yang terlibat dalam isu-isu lingkungan. Pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling untuk memastikan variasi perspektif yang memadai. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan langsung mengenai pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan lingkungan, serta untuk

### 3. Analisis Dokumen:

Analisis dokumen melibatkan pemeriksaan dokumen kebijakan, laporan resmi, data statistik, dan laporan proyek terkait implementasi kebijakan lingkungan di berbagai daerah. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Analisis ini juga membantu mengonfirmasi temuan dari wawancara dan studi literatur, serta memberikan konteks tambahan yang mendalam. Data yang diperoleh dari ketiga metode ini kemudian dianalisis secara tematik. Proses analisis tematik ini melibatkan pengkodean data untuk mengidentifikasi tema utama, menghubungkan tema-tema tersebut dengan tantangan dan peluang yang dihadapi, serta mengembangkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan implementasi kebijakan lingkungan di pemerintahan daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan rekomendasi yang aplikatif bagi pembuat kebijakan dan praktisi di lapangan.

## HASIL

Hasil Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam implementasi kebijakan lingkungan di pemerintahan daerah. Pertama, keterbatasan sumber daya finansial dan manusia menjadi hambatan signifikan. Banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menyediakan anggaran yang memadai untuk program lingkungan karena prioritas anggaran sering kali dialokasikan ke sektor lain seperti infrastruktur dan kesehatan. Selain itu, kekurangan tenaga ahli di bidang lingkungan mengakibatkan rendahnya kapasitas teknis dalam merencanakan dan melaksanakan program lingkungan secara efektif.

Kedua, terdapat masalah koordinasi dan sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Regulasi yang tidak sinkron sering kali menimbulkan kebingungan di lapangan, menghambat implementasi kebijakan yang efektif. Koordinasi yang buruk antar lembaga pemerintah, baik di tingkat horizontal (antar lembaga di tingkat daerah) maupun vertikal (antara pusat dan daerah), juga menyebabkan tumpang tindih program dan kebijakan yang tidak efektif.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan implementasi kebijakan lingkungan. Penggunaan teknologi inovatif, seperti sistem informasi geospasial dan alat pemantauan kualitas udara real-time, terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan lingkungan. Selain itu, kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah menawarkan dukungan tambahan dalam bentuk pendanaan dan peningkatan kapasitas.

## PEMBAHASAN

Pembahasan, Keterbatasan sumber daya finansial dan manusia merupakan tantangan yang umum dihadapi oleh banyak pemerintah daerah. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya upaya peningkatan efisiensi anggaran serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan. Pengalokasian anggaran yang lebih bijaksana, dengan memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada perbaikan lingkungan, dapat menjadi salah satu solusi. Selain itu, kolaborasi dengan sektor

swasta dalam bentuk kemitraan publik-swasta dapat membantu menutupi kekurangan dana dan sumber daya.

Masalah koordinasi dan sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa regulasi yang dibuat sinkron dengan kebutuhan dan kondisi lokal di daerah. Selain itu, peningkatan komunikasi dan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah melalui forum koordinasi dan platform berbagi informasi dapat mengurangi tumpang tindih program dan kebijakan.

Peluang penggunaan teknologi inovatif dalam pengelolaan lingkungan menunjukkan hasil yang menjanjikan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi 235 ini untuk pemantauan dan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efektif. Implementasi sistem informasi geospasial, misalnya, dapat membantu dalam perencanaan tata ruang yang lebih baik, sementara alat pemantauan kualitas udara real-time dapat memberikan data yang diperlukan untuk mengambil tindakan cepat dalam menghadapi masalah polusi.

Kemitraan strategis dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah juga menawarkan berbagai keuntungan. Sektor swasta dapat memberikan dukungan finansial dan teknologi, sementara organisasi non-pemerintah dapat berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan advokasi kebijakan. Dengan membangun kemitraan yang kuat, pemerintah daerah dapat mengatasi beberapa tantangan utama dalam implementasi kebijakan lingkungan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai hasil yang lebih baik. .

## **KESIMPULAN**

Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti sistem informasi geospasial dan pemantauan kualitas udara secara real-time, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program lingkungan hidup. Selain itu, kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi nonpemerintah juga dapat menjadi katalis dalam memperkuat kapasitas dan pembiayaan. Adanya kesadaran global akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh dukungan internasional baik berupa dana maupun teknis untuk proyekproyek lingkungan hidup

## **REFERENSI PENGEMBANGAN**

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak tantangan dalam implementasi kebijakan lingkungan di pemerintahan daerah, ada juga berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan. Dengan pendekatan yang strategis dan kolaboratif, tantangan tersebut dapat diatasi dan implementasi kebijakan lingkungan dapat ditingkatkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian lebih mendalam terkait peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan secara inklusif diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teknologi yang berwawasan lingkungan dan menjadi dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah yang berbasis masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik, J. G., & Rahmadi, N. (2022). Pembaharuan Dalam Manajemen Pelayanan Publik Daerah: Tantangan dan Peluang Dalam Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 1(2), 148-160. <https://doi.org/10.38156/governancejkmp.v1i2.27>
- Ridwan, R., & Delima, S. (2021). Implementasi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di PT. Perkebunan Nusantara VI. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 3(2), 88-100. <https://doi.org/10.36355/jppd.v3i2.31>
- Pambudi, A. S. (2023). Capaian, tantangan implementasi, dan rekomendasi kebijakan perhutanan sosial di indonesia. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 74-94. <https://doi.org/10.33701/jkp.v6i2.3551>
- Azis, M., & Suryana, E. A. (2023). Komparasi dan implementasi kebijakan digitalisasi pertanian:

- Peluang dan tantangan. *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*, 10(3), 179-198.  
<https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v10i3.51083>
- Wibowo, T. U. S. H. (2022). Peluang Dan Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” Dalam Pendidikan Dan Pembelajaran Sejarah. <https://doi.org/10.31219/osf.io/dr38u>
- Madani, M. (2020). Interaksi Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan Anggaran Di Kota Makassar. <https://doi.org/10.31227/osf.io/heg9z>
- Eryani, N. D. (2022). Kebijakan pemerintahan daerah dalam pengelolaan kerusakan lingkungan hidup di kabupaten sijnjung dan kabupaten dharmasraya. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 2(1), 1-15.  
<https://doi.org/10.25077/jdpl.2.1.1-15.2020>
- Madani, M. (2020). Interaksi Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan Anggaran Di Kota Makassar. <https://doi.org/10.31219/osf.io/jqstb>
- Azikin, A. (2018). Konsep dan implementasi ideologi pancasila dalam perumusan kebijakan pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 77-90. <https://doi.org/10.33701/jkp.v1ino.2.1098>
- Achmad, F. Y. N. A. (2024). Tantangan dan peluang implementasi kebijakan zero waste di kota baubau. *Journal Publicuho*, 7(1), 212-223. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.348>
- Pradana, R. S. (2019). Peluang dan tantangan subsektor perikanan dalam menopang perekonomian provinsi banten. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 3(2), 113-126.  
<https://doi.org/10.37950/jkpd.v3i2.70>
- Achmad, F. Y. N. A. (2024). Tantangan dan peluang implementasi kebijakan zero waste di kota baubau. *Journal Publicuho*, 7(1), 212-223. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.348>
- Puspitawati, D. (2020). Pembangunan wilayah kepulauan berlandaskan poros maritim dalam perspektif negara kepulauan: Tantangan dan peluang perimbangan keuangan daerah. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), 251. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.107>
- Thahir, B. (2018). Memahami kawasan khusus dalam sistem pemerintahan daerah di indonesia. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 103-114. <https://doi.org/10.33701/jkp.v1ino.2.1100>
- Rahman, M. A. (2023). Tantangan dan Solusi Dalam Implementasi Program Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” (MBKM) di Perguruan Tinggi. <https://doi.org/10.31237/osf.io/m32va>
- Wulandari, C., Budiono, P., & Nurrochmat, D. R. (2017). Kesiapan daerah dalam implementasikan program perhutanan sosial pasca terbitnya uu 23/2014 tentang pemerintahan daerah. *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*, 3(2), 22.  
<https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v3i2.15512>
- Sudirman, D., W., & S., M. (2005). Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan daerah di kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi: Ketidakpastian, tantangan, dan harapan. <https://doi.org/10.17528/cifor/001694>
- Braksa, A. R., & Ridwan, R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi parkir di tempat khusus dalam pengelolaan parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 1(2), 131-144. <https://doi.org/10.36355/jppd.v1i2.12>
- MUSLIMAH,. (2023). Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia. <https://doi.org/10.31237/osf.io/a2yxu>
- Anggraini, T., & Agustian, D. (2021). Peran badan penanggulangan bencana daerah dalam upaya pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kabupaten musi banyuasin. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 41-46. <https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1510>
- Aprimawati, B. (2016). Kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan persampahan dinas pengelolaan lingkungan hidup dan keindahan kota makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(2), 61. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i2.150>
- Afriansyah, A. (2017). Implementasi program kartu jakarta pintar di dki: Peluang dan tantangan dalam pemenuhan keadilan sosial di bidang pendidikan. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(1), 55. <https://doi.org/10.14203/jki.v12i1.196>
- Norhadijah, N., Yuni, S., & Christian, F. (2023). PENGARUH IMPLEMENTASI TRANAKSI NON TUNAI, AKUNTABILITAS, DAN KEBIJAKAN LEGAL SISTEM INFORMASI

- TERHADAP PENGELOAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Pada OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan). *Balance: Media Informasi Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 22-34. <https://doi.org/10.52300/blnc.v14i1.8554>
- Ina Loriana Lorenza, & Aan Anwar Sihabudin,. (2022). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan prestasi olahraga oleh komite olahraga nasional indonesia di kabupaten ciamis. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 856-867. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2869>
- Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>
- Asparill, T. A. (2022). ~~Pemerintahan Daerah~~ dan Fasilitas Pendidikan Politik: Peluang dan Tantangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(2), 147-171. <https://doi.org/10.59066/jmi.v1i2.126>
- Syarief, M. (2020). Optimalisasi pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan (wap) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di negara kesatuan republik indonesia. *JURNAL CAPITAL : Kebijakan Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 1-19. <https://doi.org/10.33747/capital.v3i2.48>
- Andri, Y., & Aziz, Y. M. A. (2021). Strategi Kebijakan Lingkungan Program Citarum Harum Di Kabupaten Bandung. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 3(2), 114-124. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v3i2.13561>
- Mayor, D., & Syafitri, A. A. (2019). Implementasi gerakan desa mengajar dalam peningkatan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di kabupaten bogor provinsi jawa barat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 75-89. <https://doi.org/10.33701/jkp.v2i1.918>
- Muhammad, F., & Mahmudi, M. (2006). Tantangan dan Peluang Pemerintah Daerah dalam PenanggulanganKemiskinan. *Unisia*, 29(59), 99-110. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss59.art7>
- Mayor, D., & Syafitri, A. A. (2019). Implementasi gerakan desa mengajar dalam peningkatan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di kabupaten bogor provinsi jawa barat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 75-89. <https://doi.org/10.33701/jkp.v2i1.918>